eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/k9hz6026
Hal. 9095-9109

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Kemandirian Infrastruktur Digital dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Website JDIH dan e-Kliping Sekretariat DPRD Sidoarjo

Revilia Nur Wahyuni[1*], Andi Suwarko[2]
Program Studi lmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia[1,2]

*Email Korespodensi: reviliawahyuni@gmail.com

Diterima: 20-11-2026 | Disetujui: 25-11-2026 | Diterbitkan: 27-11-2026

ABSTRACT

Digital government transformation involves not only technological adoption but also organizational dependence on resources and the distribution of authority. This study examines digital infrastructure autonomy and power relations within the Secretariat of the Sidoarjo Regency Regional House of Representatives (DPRD), focusing on the management of its Legal Documentation and Information Network (JDIH) and e-clipping system. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews and institutional document analysis and examined using Resource Dependence Theory. The findings reveal that the management of both systems relies on internal resources, including human resource capacity, document availability, and administrative coordination, as well as external technical support. These dependencies shape organizational relationships and the distribution of management responsibilities. The proposed transfer of website management to the local Communication and Information Office indicates a reconfiguration of external dependencies rather than their complete elimination. This study contributes to digital governance research by conceptualizing digital infrastructure autonomy as an organization's capacity to manage resource dependencies, retain strategic authority, and influence the direction of its digital infrastructure development.

Keywords: *Digital Governance; Resource Dependence; Power Relations; Digital Infrastructure Autonomy; Local Legislature.*

ABSTRAK

Transformasi pemerintahan digital tidak hanya mencakup penerapan teknologi, tetapi juga melibatkan ketergantungan organisasi terhadap sumber daya serta distribusi kewenangan. Penelitian ini mengkaji kemandirian infrastruktur digital dan relasi kekuasaan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, dengan berfokus pada pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sistem kliping elektronik (*e-clipping*). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kelembagaan, kemudian dianalisis menggunakan Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kedua sistem tersebut bergantung pada sumber daya internal, meliputi kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dokumen, dan koordinasi administratif, serta dukungan teknis dari pihak eksternal. Ketergantungan tersebut turut membentuk hubungan organisasi dan distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan sistem. Rencana pengalihan pengelolaan situs web kepada Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan adanya penataan ulang pola ketergantungan eksternal, bukan penghapusan ketergantungan secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian tata kelola digital dengan memaknai kemandirian infrastruktur digital sebagai kapasitas organisasi dalam mengelola ketergantungan sumber daya, mempertahankan kewenangan strategis, serta menentukan arah pengembangan infrastruktur digitalnya.

Kata kunci: Tata Kelola Digital; Ketergantungan Sumber Daya; Relasi Kekuasaan; Kemandirian Infrastruktur Digital; Lembaga Legislatif Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Wahyuni, R. ., & Suwarko, A. (2026). Kemandirian Infrastruktur Digital dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Website JDIH dan e-Kliping Sekretariat DPRD Sidoarjo. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 9095-9109. https://doi.org/10.63822/k9hz6026

PENDAHULUAN

Digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi publik dengan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan bentuk pelayanan dari manual menjadi elektronik, tetapi juga mencakup bagaimana suatu organisasi mengelola informasi, membangun sistem komunikasi, serta menentukan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengoperasikan infrastruktur digitalnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi menjadi penting karena dapat mendukung keterbukaan informasi, memperluas akses masyarakat terhadap dokumen pemerintahan, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik (Hendra & Fahlevi, 2024). Namun, penerapan teknologi digital tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan organisasi dalam mengelola sistem secara mandiri (Kurniawan et al., 2026). Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kemampuan teknis, serta ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan infrastruktur informasi digital.

Persoalan tersebut juga relevan untuk melihat pengelolaan informasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kebutuhan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, produk hukum, serta berbagai aktivitas kedewanan kepada masyarakat. Kebutuhan tersebut didukung melalui pemanfaatan situs web resmi DPRD yang memuat sejumlah fitur, di antaranya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta e-kliping. Kedua fitur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam satu situs web kelembagaan. JDIH berperan dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum, sedangkan e-kliping digunakan untuk menghimpun pemberitaan yang berkaitan dengan aktivitas DPRD serta hal sosial, politik, hukum, pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan kedua fitur menunjukkan bahwa situs web tidak sekadar menjadi sarana publikasi, melainkan juga bagian dari infrastruktur informasi yang menunjang pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD (Salafian, 2025).

Pemanfaatan situs web sebagai sarana informasi kelembagaan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berada dalam kerangka kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 sebagai pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Melalui evaluasi tersebut, tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap instansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk nilai indeks (Fitri et al., 2024). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti ketentuan tersebut di tingkat daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah (Kristieyanti et al., 2026).

Meskipun Kabupaten Sidoarjo memperoleh predikat “sangat baik” dalam evaluasi SPBE tahun 2024, capaian tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat kemandirian pengelolaan infrastruktur informasi pada masing-masing perangkat daerah. Hal ini karena indeks SPBE mengukur kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara institusional, sedangkan kemandirian infrastruktur informasi berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam mengendalikan sumber daya, kewenangan teknis, dan proses pengembangan sistem yang digunakan. Dengan demikian, capaian SPBE yang tinggi belum tentu mencerminkan kemampuan setiap unit organisasi untuk mengelola infrastruktur informasinya secara mandiri. Perbedaan inilah yang menjadi titik awal untuk menelaah

hubungan antara digitalisasi, ketergantungan sumber daya, dan distribusi kewenangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo (Sidoarjo, 2025).

Pengamatan awal selama kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan infrastruktur informasi digital, khususnya pada fitur JDIH dan e-kliping. Persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan, pemenuhan kebutuhan teknis, serta keterlibatan aktor di luar organisasi. Informasi awal mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dan rencana pengalihan pengelolaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur digital tidak sepenuhnya berlangsung dalam kendali internal Sekretariat DPRD. Kondisi ini menjadi dasar untuk menelusuri bagaimana ketergantungan sumber daya terbentuk dan sejauh mana organisasi memiliki kewenangan dalam menentukan arah pengelolaan sistem informasinya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan digitalisasi tidak hanya terletak pada ketersediaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarpihak yang terlibat dalam pengelolaannya. (Dr. Etin Indrayani, 23 C.E.) berpendapat ketika suatu lembaga masih membutuhkan dukungan pihak eksternal untuk menjalankan sistem digital, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga tersebut memiliki kendali terhadap infrastruktur informasinya sendiri. Ketergantungan dapat berkaitan dengan aspek teknis, pembiayaan, pemeliharaan sistem, maupun kewenangan dalam menentukan arah pengembangan . Oleh karena itu, kemandirian pengelolaan informasi digital perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang melibatkan kemampuan organisasi dalam mengendalikan sumber daya, menentukan kebijakan pengelolaan, serta membangun kapasitas internal untuk menjaga keberlanjutan sistem (Djafar et al., 2025). Dalam hal ini, hubungan antara Sekretariat DPRD, pihak ketiga, dan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi penting untuk ditelusuri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi pemerintahan dari berbagai sudut pandang. (Akbar et al., 2024), misalnya, mengkaji tingkat digitalisasi pemerintah daerah melalui studi literatur dengan menyoroti perkembangan penerapan teknologi digital di lingkungan pemerintahan. (Handoko et al., 2026) membahas hubungan antara organisasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital di Indonesia. Sementara itu, (Rizky et al., 2025) menempatkan transformasi e-government sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. (Fadhly et al., 2024) juga turut mengkaji praktik transparansi digital pada pemerintah daerah, sedangkan (Haug et al., 2024) menyoroti perubahan yang muncul dalam organisasi sektor publik akibat penerapan teknologi digital. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa digitalisasi memiliki keterkaitan erat dengan perubahan tata kelola, transparansi, dan kapasitas organisasi pemerintahan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman mengenai perkembangan digitalisasi dalam organisasi publik, pembahasan mengenai kemandirian pengelolaan infrastruktur informasi pada lembaga legislatif daerah masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan digitalisasi dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan transformasi organisasi. Sementara itu, penelitian ini berupaya melihat persoalan dari sisi hubungan kelembagaan, khususnya bagaimana ketergantungan terhadap aktor eksternal dapat memengaruhi proses pengelolaan dan pengembangan sistem informasi digital di lingkungan DPRD. Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan untuk sekadar menilai keberhasilan atau kegagalan situs web, melainkan menelusuri proses pembentukan kemandirian pengelolaan informasi digital beserta relasi kewenangan yang

menyertainya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan Resource Dependence Theory untuk menjelaskan bagaimana ketergantungan sumber daya membentuk relasi kekuasaan dalam pengelolaan infrastruktur informasi digital lembaga legislatif daerah. Melalui studi pengelolaan JDIH dan e-kliping di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini mengidentifikasi sisi kebaruan *(novelty)* bahwa kemandirian digital tidak dapat diukur hanya dari kepemilikan atau ketersediaan sistem, tetapi juga dari kapasitas organisasi dalam mengendalikan sumber daya teknis, menentukan pembagian kewenangan, dan mengelola hubungan dengan aktor eksternal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan digitalisasi pemerintahan dari perspektif capaian teknologi menuju analisis relasi sumber daya dan kekuasaan dalam tata kelola kelembagaan.

Meskipun penelitian sebelumnya *(research gap)* telah memberikan pemahaman mengenai perkembangan digitalisasi dalam organisasi publik, pembahasan mengenai kemandirian pengelolaan infrastruktur informasi pada lembaga legislatif daerah masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan digitalisasi dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan transformasi organisasi. Fokus tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana lembaga legislatif daerah memenuhi kebutuhan sumber daya digital, membagi kewenangan pengelolaan, serta mengelola ketergantungan terhadap aktor eksternal. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang menempatkan kemandirian infrastruktur informasi DPRD sebagai persoalan relasi antarorganisasi dan penguasaan sumber daya, bukan semata-mata sebagai persoalan penerapan teknologi atau keterbukaan informasi. Penelitian ini karena itu tidak diarahkan untuk sekadar menilai keberhasilan atau kegagalan situs web, melainkan menelusuri proses pembentukan kemandirian pengelolaan informasi digital beserta relasi kewenangan yang menyertainya.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan *Resource Dependence Theory* yang dikemukakan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik (1978). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi tidak sepenuhnya berdiri sendiri karena dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan sumber daya yang dapat berada dalam kendali aktor lain (Alsuhaimi, 2026). Resource Dependence Theory menjelaskan bahwa keberlangsungan organisasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuannya memperoleh sumber daya yang berada dalam kendali aktor lain. Ketergantungan muncul ketika organisasi membutuhkan sumber daya yang penting bagi keberlangsungan aktivitasnya, tetapi tidak memiliki kendali penuh atas penyediaan sumber daya tersebut (Yulianto et al., 2026). Dalam kondisi demikian, penguasaan sumber daya dapat membentuk ketimpangan kekuasaan antarorganisasi karena pihak yang memiliki akses atau kendali terhadap sumber daya strategis berpotensi memengaruhi keputusan organisasi yang bergantung kepadanya. Oleh karena itu, organisasi mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola ketergantungan, mengurangi ketidakpastian, dan mempertahankan ruang kendali dalam menjalankan aktivitas kelembagaannya (Pfeffer, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana proses Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo membangun kemandirian informasi digital dalam relasi kewenangan dengan pihak eksternal, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan situs web DPRD, termasuk pengelola JDIH dan e-kliping, pejabat Sekretariat DPRD, serta pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Penelusuran

dokumen juga dilakukan terhadap informasi mengenai kerja sama pengelolaan, kebijakan kelembagaan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami proses pengelolaan, bentuk ketergantungan, serta upaya yang dilakukan dalam membangun kemandirian infrastruktur informasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan infrastruktur informasi digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan studi kasus didasarkan pada karakteristik persoalan penelitian yang berfokus pada hubungan antara ketergantungan sumber daya, pembagian kewenangan, dan strategi organisasi dalam mengelola infrastruktur digital. Unit analisis penelitian adalah proses pengelolaan JDIH dan e-kliping, dengan perhatian pada hubungan antara pengelola internal, pejabat Sekretariat DPRD, dan aktor eksternal yang terlibat dalam penyediaan dukungan teknis.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses pengelolaan kedua fitur tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen kelembagaan yang relevan. Wawancara diarahkan untuk mengidentifikasi jenis sumber daya yang dibutuhkan, pembagian tanggung jawab, bentuk ketergantungan terhadap aktor eksternal, serta strategi penguatan kapasitas internal. Data kemudian dianalisis melalui proses pengorganisasian informasi, reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Kategorisasi dilakukan dengan mengacu pada dimensi Resource Dependence Theory, khususnya ketergantungan sumber daya, relasi kekuasaan, dan strategi pengelolaan ketergantungan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan infrastruktur informasi digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memperlihatkan bahwa proses digitalisasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber daya, pembagian kewenangan, serta hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kondisi tersebut dapat ditelusuri melalui pengelolaan fitur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan e-kliping pada situs web DPRD Kabupaten Sidoarjo (Anjani & Abdal, 2026). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dinamika antara kebutuhan sumber daya internal dengan keterlibatan aktor eksternal dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan situs web. Oleh karena itu, pembahasan ini menggunakan *Resource Dependence Theory* untuk menganalisis bentuk ketergantungan sumber daya, relasi kekuasaan yang muncul dalam pembagian kewenangan, serta strategi kelembagaan dalam membangun kemandirian pengelolaan infrastruktur informasi digital.

Dinamika Ketergantungan Sumber Daya dalam Pengelolaan Infrastruktur Digitalisasi DPRD Kabupaten Sidoarjo

Pengelolaan infrastruktur informasi digital pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan aktivitas kelembagaan. Keberadaan fitur JDIH dan e-kliping pada situs web DPRD menunjukkan adanya upaya penyediaan informasi digital kepada masyarakat melalui dua fungsi yang berbeda. JDIH digunakan untuk menyediakan dokumentasi dan informasi hukum, sedangkan e-kliping berfungsi menghimpun pemberitaan yang berkaitan dengan aktivitas DPRD serta berbagai persoalan sosial, politik, hukum, dan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun keduanya telah tersedia dalam satu situs web kelembagaan, proses pengelolaannya tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia, ketersediaan dokumen, kemampuan administratif, dan penguasaan teknis terhadap sistem yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin e-kliping, proses pengelolaan informasi tidak hanya dilakukan dengan mengunggah dokumen secara langsung, tetapi harus melalui beberapa tahapan administratif terlebih dahulu. Informan menjelaskan bahwa :

"Dalam proses pengelolaan e-kliping, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, mulai dari menyeleksi hasil pemindaian surat kabar yang sesuai, mengisi kolom kebutuhan unggahan, hingga melakukan proses pengunggahan ke dalam website. Proses tersebut memang sedikit rumit, tetapi tetap harus dilakukan agar informasi dapat dipublikasikan dengan baik." (Wawancara dengan Admin e-kliping, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan e-kliping membutuhkan ketelitian pengelola dalam menyeleksi informasi serta kemampuan untuk menjalankan prosedur pengunggahan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan demikian, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menghilangkan proses administratif, melainkan mengubah bentuk pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi rangkaian aktivitas digital. Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan dalam pengelolaan JDIH. Berdasarkan keterangan admin JDIH, proses pengunggahan dokumen terkadang membutuhkan waktu karena harus menunggu penyelesaian kegiatan rapat terlebih dahulu. Informan menyampaikan bahwa :

"Proses pengunggahan dokumen pada JDIH terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu rapat selesai terlebih dahulu. Setelah dokumen tersedia, barulah proses pengunggahan dapat dilakukan. Kondisi tersebut membuat proses publikasi terkadang memerlukan waktu lebih panjang." (Wawancara dengan Admin JDIH, 2026).

Keterangan ini memperlihatkan bahwa proses pengelolaan informasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis admin dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dokumen yang berasal dari aktivitas kelembagaan. Artinya, proses publikasi informasi memiliki keterkaitan dengan koordinasi internal dan alur administrasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat DPRD. Jika dilihat lebih jauh, kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan infrastruktur informasi digital membutuhkan keterpaduan beberapa jenis sumber daya. Pada e-kliping, sumber daya yang dibutuhkan berkaitan dengan ketersediaan bahan pemberitaan, kemampuan menyeleksi informasi, dan keterampilan teknis pengelola.

Perbedaan proses pengelolaan JDIH dan e-kliping memperlihatkan bahwa ketergantungan sumber daya dalam digitalisasi tidak selalu berasal dari penyedia teknologi eksternal. Pada pengelolaan e-kliping, keberlangsungan publikasi bergantung pada kemampuan pengelola dalam menyeleksi dan mengolah bahan

pemberitaan, sedangkan pengelolaan JDIH bergantung pada ketersediaan dokumen hukum yang dihasilkan melalui aktivitas kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan fungsional antarbagian dalam organisasi, ketika kelancaran satu proses kerja ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang dikelola oleh bagian lain. Dengan demikian, kemandirian pengelolaan informasi digital tidak cukup dibangun melalui penguasaan teknologi, tetapi juga membutuhkan koordinasi internal dan kepastian alur penyediaan informasi. Dalam perspektif Resource Dependence Theory, temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan sumber dayanya menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur digital.



Gambar 1. *Website DPRD Kab. Sidoarjo* https://dprd.sidoarjokab.go.id/

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Resource Dependence Theory* yang dikemukakan oleh (Pfeffer, 1978) teori ini memandang organisasi sebagai entitas yang tidak sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri karena dalam menjalankan aktivitasnya organisasi membutuhkan sumber daya tertentu yang dapat berada dalam kendali pihak lain (Putri et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, ketergantungan sumber daya tidak hanya dapat dilihat dari hubungan Sekretariat DPRD dengan pihak eksternal, tetapi juga dari kebutuhan terhadap sumber daya yang tersedia di dalam organisasi. Aktivitas pengelolaan JDIH dan e-kliping menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem informasi bergantung pada kemampuan pengelola, ketersediaan dokumen, serta koordinasi antarbagian. Oleh sebab itu, keterbatasan pada salah satu unsur tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses pengelolaan dan publikasi informasi.

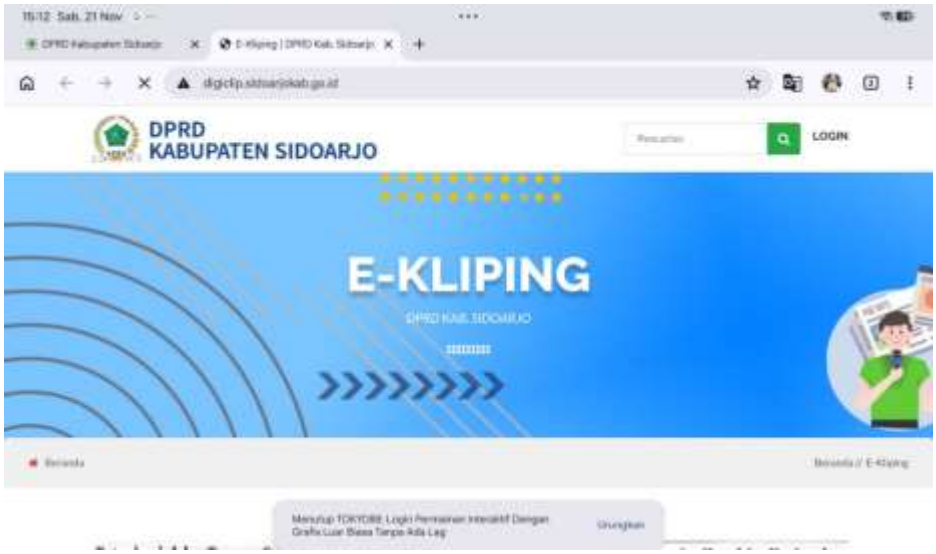

Gambar 2. *Masuk E-Kliping DPRD Kab. Sidoarjo*

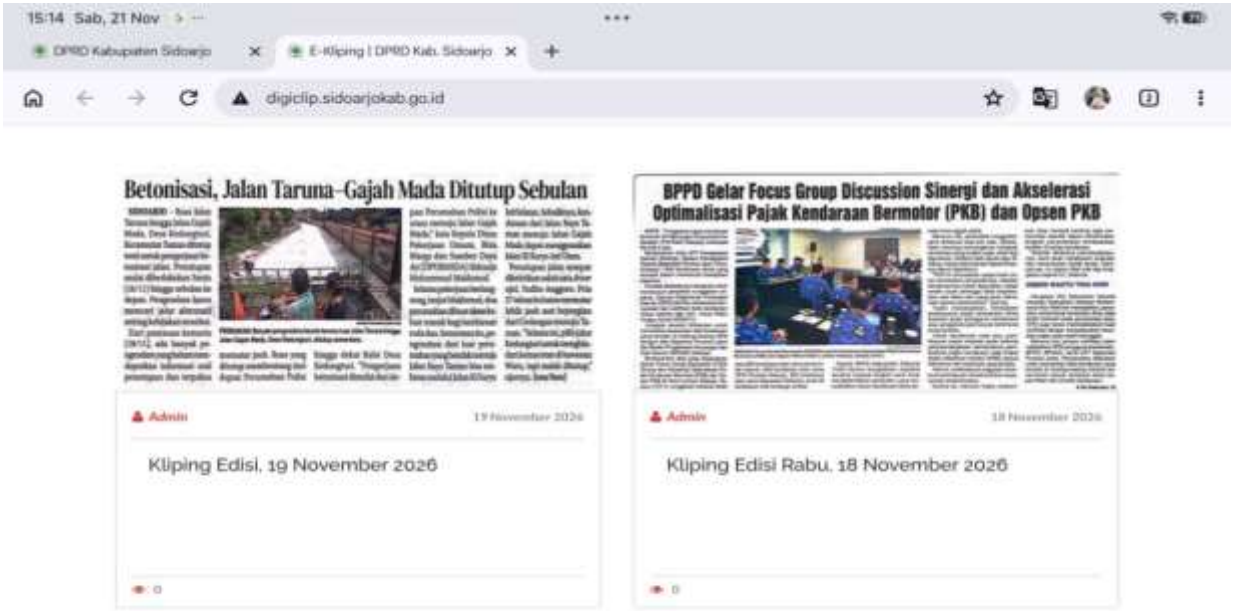

Gambar 3. *Bentuk Berita E-Kliping DPRD Kab. Sidoarjo*

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian (Harsya et al., 2026) yang menjelaskan bahwa perubahan digital dalam sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan pada tingkat organisasi, prosedur kerja, hubungan antaraktor, dan kemampuan individu. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi pengelolaan JDIH dan e-kliping yang memperlihatkan bahwa penerapan sistem digital tetap membutuhkan penyesuaian terhadap alur kerja dan kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses penyesuaian kapasitas organisasi dalam menjalankan

aktivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, capaian analisis melalui *Resource Dependence Theory* pada bagian ini terletak pada teridentifikasinya kebutuhan sumber daya yang menopang pengelolaan infrastruktur informasi digital DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan sumber daya tidak selalu berbentuk hubungan dengan penyedia teknologi eksternal, tetapi juga dapat muncul melalui kebutuhan terhadap dokumen, tenaga pengelola, kemampuan teknis, dan koordinasi internal. Temuan ini memperlihatkan bahwa kemandirian digital perlu dibangun melalui penguatan kapasitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya yang menunjang keberlangsungan sistem. Dengan demikian, keberadaan JDIH dan e-kliping belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran kemandirian, karena kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya yang mendukung kedua fitur tersebut juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Relasi Kekuasaan dan Pembagian Kewenangan dalam Tata Kelola Infrastruktur Informasi Digital

Selain berkaitan dengan kebutuhan sumber daya internal, pengelolaan infrastruktur informasi digital DPRD Kabupaten Sidoarjo juga memperlihatkan adanya hubungan ketergantungan dengan aktor eksternal. Salah satu temuan penelitian ini adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan situs web DPRD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian, pengelolaan situs web saat ini masih menggunakan jasa pihak ketiga karena lembaga berupaya menjaga independensi pengelolaannya, meskipun penggunaan jasa tersebut membutuhkan pembiayaan tersendiri. Informan menyampaikan bahwa :

"Untuk saat ini, pengelolaan website DPRD masih menggunakan jasa pihak ketiga karena kami ingin pengelolaannya tetap bersifat independence. Oleh karena itu, terdapat pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga tersebut." (Wawancara dengan Kepala Subbagian, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan situs web masih membutuhkan dukungan teknis dari luar organisasi untuk menunjang keberlangsungan sistem informasi kelembagaan. Dalam perspektif *Resource Dependence Theory* yang dikemukakan Pfeffer dan Salancik (1978), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketergantungan organisasi terhadap sumber daya yang berada di luar kendali langsungnya.

Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan situs web DPRD menunjukkan adanya hubungan ketergantungan yang perlu dilihat lebih jauh melalui distribusi penguasaan sumber daya teknis. Dalam hubungan tersebut, Sekretariat DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian informasi kelembagaan, sedangkan penyedia layanan eksternal berperan dalam memenuhi kebutuhan teknis pengelolaan sistem. Perbedaan fungsi tersebut berpotensi membentuk ketimpangan posisi apabila akses terhadap infrastruktur, kemampuan pemeliharaan, atau pengambilan keputusan teknis lebih banyak berada dalam kendali penyedia layanan. Oleh karena itu, relasi kekuasaan dalam pengelolaan digital tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga dengan kemampuan masing-masing aktor dalam mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Namun, tingkat ketimpangan tersebut perlu ditelusuri melalui pembagian akses, tanggung jawab, dan kewenangan aktual dalam pengelolaan situs web DPRD.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (Kristian et al., 2024) yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi transparansi digital pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian tersebut

menekankan pentingnya kematangan e-government dan akuntabilitas dalam mendukung keterbukaan informasi pemerintah. Sementara itu, (Nisar et al., 2026) juga membahas transformasi digital sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini memberikan perhatian pada aspek yang berada di balik penyelenggaraan transparansi digital, yaitu hubungan ketergantungan sumber daya dan pembagian kewenangan antara organisasi dengan penyedia layanan eksternal. Artinya, keterbukaan informasi melalui situs web tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi bagi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengendalikan infrastruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, capaian analisis melalui *Resource Dependence Theory* pada bagian ini terletak pada teridentifikasinya hubungan ketergantungan antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan penyedia layanan eksternal. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap sumber daya teknis dan pembiayaan dapat memengaruhi pola hubungan antarpihak dalam pengelolaan situs web. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam tata kelola digital tidak hanya dapat dilihat melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui penguasaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kemandirian infrastruktur informasi digital turut ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengatur pembagian tanggung jawab dan mempertahankan kendali terhadap pengelolaan sistemnya.

Strategi Penguatan Kemandirian Pengelolaan Infrastruktur Informasi Digital DPRD Kabupaten Sidoarjo

Rencana pengalihan pengelolaan situs web kepada Diskominfo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya upaya Sekretariat DPRD untuk menata kembali hubungan ketergantungan dalam pemenuhan sumber daya teknis. Namun, perubahan aktor pengelola tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian organisasi. Apabila penguasaan infrastruktur, pemeliharaan sistem, dan pengambilan keputusan teknis sepenuhnya beralih kepada Diskominfo, Sekretariat DPRD tetap memiliki ketergantungan terhadap kapasitas lembaga lain. Dengan demikian, strategi tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan konfigurasi ketergantungan daripada penghapusan ketergantungan itu sendiri. Kemandirian digital dalam konteks ini ditentukan oleh kemampuan Sekretariat DPRD untuk mempertahankan kewenangan dalam menentukan kebutuhan informasi, mengawasi pengelolaan sistem, serta memastikan bahwa hubungan kerja sama tidak menghilangkan kendali kelembagaan atas infrastruktur informasinya, informan menyampaikan bahwa :

"Ke depannya kami sedang mengupayakan agar pengelolaan website DPRD dapat dilakukan langsung oleh Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, meskipun saat ini prosesnya masih dalam tahap pengurusan." (Wawancara dengan Kepala Subbagian, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk membangun pola hubungan baru dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan infrastruktur informasi digital, meskipun proses pengalihannya belum selesai dilaksanakan. Dalam perspektif *Resource Dependence Theory*, rencana tersebut dapat dipahami sebagai strategi organisasi untuk mengelola kembali ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. (Pfeffer, 1978) menjelaskan bahwa organisasi dapat melakukan penyesuaian hubungan dengan aktor lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, rencana pengalihan kepada Diskominfo tidak serta-merta menghilangkan

ketergantungan, melainkan berpotensi mengubah bentuk hubungan dari penyedia jasa pihak ketiga menjadi hubungan antarlembaga pemerintahan. Oleh karena itu, kemandirian tidak cukup dinilai dari perubahan pihak yang mengelola situs web, tetapi juga perlu dilihat dari kejelasan pembagian tanggung jawab, kewenangan teknis, dan kemampuan Sekretariat DPRD dalam mengarahkan pengembangan sistem sesuai kebutuhan kelembagaan.

Selain melalui penataan hubungan dengan pihak eksternal, penguatan kemandirian juga membutuhkan komitmen dari unsur internal organisasi. Hal tersebut terlihat dari keterangan Kepala Humas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan situs web DPRD. Informan menyampaikan bahwa :

"Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pengelolaan website DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sidoarjo dampak nya, meskipun sampai saat ini website tersebut masih terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi kelembagaan." (Wawancara dengan Kepala Humas, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keberlangsungan dan menyesuaikan pengelolaan situs web dengan kebutuhan informasi kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan (Gantika, 2026) yang menjelaskan bahwa perubahan digital dalam organisasi sektor publik tidak hanya membutuhkan penerapan teknologi, tetapi juga penyesuaian kapasitas organisasi, prosedur kerja, dan kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, dukungan teknis dari pihak eksternal perlu diimbangi dengan kemampuan internal dalam memahami kebutuhan sistem, melakukan pengawasan, serta menentukan arah pengembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, capaian analisis melalui *Resource Dependence Theory* pada bagian ini terletak pada teridentifikasinya strategi Sekretariat DPRD dalam menata kembali ketergantungan sumber daya dan memperkuat kapasitas internal. Rencana pengalihan pengelolaan kepada Diskominfo menunjukkan upaya untuk membangun pola hubungan kelembagaan yang berbeda, sedangkan komitmen pembaruan situs web memperlihatkan pentingnya peran internal dalam menjaga keberlanjutan sistem.

Temuan ini juga memperluas penelitian (Rahman & Daud, 2025) yang membahas perkembangan digitalisasi pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pada tingkat organisasi turut dipengaruhi oleh kemampuan mengelola hubungan sumber daya dan kewenangan. Dengan demikian, kemandirian digital tidak harus dimaknai sebagai kondisi ketika organisasi sepenuhnya terlepas dari dukungan pihak lain, melainkan sebagai kemampuan untuk mengatur hubungan ketergantungan, menentukan kebutuhan sumber daya, dan mempertahankan kendali terhadap arah pengembangan infrastrukturnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian pengelolaan infrastruktur informasi digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola ketergantungan sumber daya dan mempertahankan kewenangan kelembagaannya. Pengelolaan JDIH dan e-kliping memperlihatkan adanya ketergantungan internal terhadap ketersediaan dokumen, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi administratif, serta ketergantungan eksternal terhadap dukungan teknis pihak ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam tata kelola digital terbentuk melalui distribusi penguasaan sumber daya dan

pembagian tanggung jawab antarpihak.

Melalui perspektif *Resource Dependence Theory*, penelitian ini memperlihatkan bahwa rencana pengalihan pengelolaan kepada Diskominfo bukan berarti menghilangkan ketergantungan, melainkan berpotensi mengubah konfigurasi hubungan antarlembaga. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian digital lebih tepat dipahami sebagai kapasitas organisasi dalam mengelola hubungan ketergantungan, mempertahankan kewenangan strategis, dan menentukan arah pengembangan infrastruktur informasinya. Secara kelembagaan, penguatan kemandirian membutuhkan kejelasan pembagian tanggung jawab, penguasaan akses teknis, peningkatan kapasitas internal, serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan sistem. Penelitian ini berkontribusi memperluas kajian digitalisasi pemerintahan dengan menempatkan penguasaan sumber daya sebagai salah satu dimensi penting dalam memahami relasi kekuasaan pada lembaga legislatif daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, P., Nurmandi, A., Mutiarin, D., Jubba, H., Usman, S., Yogyakarta, U. M., Bantul, K., & Istimewa, D. (2024). LEVEL OF DIGITALIZATION OF INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT THROUGH LITERATURE REVIEW : CASE STUDIES OF SAMARINDA CITY AND BALIKPAPAN CITY. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(2), 214–229. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.49692

Alsuhaimi, M. (2026). Governance Mechanisms and Strategic Implementation Success in Public Sector Transformations : The Moderating Roles of Change Readiness and Resource Availability. *International Review of Management and Marketing*, *16*(3), 41–51.

Anjani, R. S., & Abdal. (2026). Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mendukung Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, *4*(2), 2571–2579.

Djafar, F., Akibu, R. S., & Namdech, P. (2025). Strengthening Local Government Organisation Capacity for Adaptive Development Policy Responsive to Community Needs. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, *6*(October), 135–156.

Dr. Etin Indrayani, M. (23 C.E.). *Integrasi Sistem Layanan Digital Transformasi Digital Untuk Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia* (Karmila (ed.); Pertama). CV Cendikia Press.

Fadhly, M., Octavio, R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments : Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol.*, *11*(2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361

Fitri, A. A., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Unes Law Review*, *6*(3), 8412–8424. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3

Gantika, S. (2026). Digital Leadership dan Kesiapan Organisasi Publik dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(2), 31535–31553.

Handoko, P., Latifah, E., & Solihin, I. (2026). Analisis Efektivitas Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu*

Sosial & Hukum, *4*(4), 2731–2750. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.9752

Harsya, T. R., Firmansyah, R., Napitupulu, T. R., & Maruli, P. (2026). Leadership in Digital Transformation of the Public Sector : A Systematic Literature Review. *Greenation International Journal of Economics and Accounting*, *4*(3), 761–778. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/gijea.v4i3

Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector : a systematic review and research agenda. *Public Management Review*, *26*(7), 1963–1987. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917

Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Journal Towards World Class Bureaucracy*, *4*(3), 187–405. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1

Kristian, I., Ristala, R. N., & Ristala, H. (2024). PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG). *Jurnal Academia Praja*, *7*(2), 252–263. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/ jap.v7i2.2837

Kristieyanti, B. T., Juni, S., Astuti, W., & Kurniawan, S. (2026). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SURAT DINAS DIGITAL MELALUI APLIKASI E-BUDDY DI SEKRETARIAT DPRD SIDOARJO. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, *6*(6), 121–132.

Kurniawan, W. N., Jumantoro, S. T., & Nugroho, H. A. (2026). Analisis Elemen Sukses Pengembangan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Hukum melalui Website JDIH : Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kota Magelang. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(2), 37150–37156.

Nisar, C. D. ., Uje, Y. Y., & Making, V. (2026). Analisis Kolaborasi Inovasi Sektor Publik dan Sektor Privat dalam Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Melalui Aplikasi Pro NTT Kajian Konseptual Berbasis Tinjauan Pustaka dan Data Sekunder. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, *6*(November). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cendekia.v6i4.10637

Pfeffer, J. (1978). *A resource dependence perspective on intercorporate relations*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511570841.002

Putri, R. L., Sutrisno, J., Suprapto, Wahyono, E., & Amrulloh, M. C. (2023). The Increasing Local Government Public Value Through Social Capital, Local Government Entrepreneurial Activities, and Local Government Innovation in Situbondo District. *JURNAL NATAPRAJA : Kajian Ilmu Administrasi Negara*, *11*(1), 82–91.

Rahman, F. A., & Daud, J. (2025). Reformasi Birokrasi Digital dan Kesiapan Aparatur dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Adaptif di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Nasional Ilmu Hukum*, *2*(November), 148–159. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/prosemnashuk.v2i2.82

Rizky, J., Cempaka, R., & Aprilia, N. (2025). PEMANFAATAN E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Komputer Sains*, *1*(1), 20–29.

Salafian, J. (2025). The Politics of Legitimacy : Analysing Social Assistance Programs in Yogyakarta City 2020-2025. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(1), 25–36. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v10i1.7484

Sidoarjo, K. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024*.

Yulianto, T., Saleh, C., Noor, I., & Suryadi, S. (2026). Policy Implementation in the Digital Era : A Comprehensive Analysis of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Indonesia. *National Library of Medicane*, *4*(2), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.12688/f1000research.175463.1